

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RIVALDI HIDAYAT

2210012111165

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 01/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 01/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : RIVALDI HIDAYAT
Npm : 2210012111165
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H, M.H (Pembimbing)



THE ROLE OF THE WEST SUMATRA PROVINCIAL OFFICE OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL FISHING

Rivaldi Hidayat¹, Hendriko Arizal¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: rivaldihidayat1999@gmail.com

ABSTRACT

Article 85 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries regulates illegal fishing activities. The phenomenon of illegal fishing occurs in Air Bangis, West Sumatra. The objectives of this research are: (1) to examine the role of the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in tackling illegal fishing crimes; and (2) to identify the obstacles faced by the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in addressing illegal fishing crimes. This research employs a sociological legal research method. The data were obtained from primary and secondary sources. Data collection techniques were conducted through document studies and interviews, while data analysis used qualitative methods. The results of this study conclude that: (1) the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province plays a role in combating illegal fishing through preventive and repressive efforts; and (2) the obstacles faced by the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in addressing illegal fishing include internal factors such as budget efficiency, limitations in human resources and infrastructure, and complex regulations, as well as external factors including low public legal awareness and dependence on illegal fishing gear. Therefore, supervision of fisheries resources through the Marine and Fisheries Service, along with community participation, is necessary to tackle illegal fishing crimes.

Keywords: Fishing, Illegal Criminal Offense, Marine and Fisheries Service.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan sumber daya penting yang berperan dalam menunjang kehidupan manusia sebagai sumber pangan, mata pencaharian, serta penopang keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi perhatian global yang tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-14 tentang pelestarian ekosistem laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang berperan penting dalam

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), yaitu kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau menggunakan alat dan bahan yang dilarang. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut, seperti yang terjadi di perairan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, dengan

ditemukannya penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti pukat harimau.

Secara yuridis, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 85. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Dengan sumber data yang terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Serta analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal

Penangkapan ikan secara ilegal masih menjadi permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Praktik tersebut antara lain berupa penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti trawl, lampara dasar, dan pukat harimau, serta penggunaan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut dan menurunkan stok sumber daya ikan.

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan pengawasan melalui patroli laut dan pemeriksaan dokumen kapal perikanan. Data pengawasan tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa ratusan kapal telah diperiksa setiap tahunnya dan beberapa di antaranya diamankan karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi kepada nelayan, penggantian alat tangkap yang dilarang, serta pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui patroli laut dan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan kerja sama antar instansi serta partisipasi masyarakat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, terbatasnya sarana dan prasarana seperti armada patroli yang hanya berjumlah tiga kapal, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan patroli tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, kompleksitas

regulasi, khususnya terkait proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang harus berkoordinasi dengan Kepolisian, juga mempengaruhi kecepatan penanganan kasus.

Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan nelayan terhadap ketentuan peraturan perikanan, serta masih adanya ketergantungan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti trawl, lampara dasar, dan pukat harimau yang berpotensi merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal perlu dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi peraturan, peningkatan kesadaran hukum, serta program penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Pengawasan dilakukan melalui patroli, penegakan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta kompleksitas regulasi, dan kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran

hukum masyarakat serta ketergantungan nelayan pada alat tangkap yang dilarang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya, penguatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

B. Saran

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum melalui sosialisasi mengenai peraturan perikanan serta berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nelayan dan pembudidaya perikanan juga diharapkan menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan agar kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan regulasi turunan dari KUHAP terbaru agar proses penyidikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Uning Pratimaratri, dkk, 2017, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional*

di Padang, Bung Hatta University Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Sumber Lainnya

Mimbar Sumbar, Marak Nelayan Luar Sumatera Barat Tangkap Ikan di Air Bangis, Wagub Vasko Janji akan Tindak Tegas, <https://mimbarsumbar.id/marak-nelayan-luar-sumbar-tangkap-ikan-di-air-bangis-wagub-vasko-janji-akan-tindak-tegas/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta